



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA N 1 SULANG

Jl. Raya Sulang-Pamotan KM 1 Kab. Rembang ☎ 59254 📠 (0295) 6998826

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester : XI / Ganjil
Materi Pokok : Sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tahun Pelajaran : 2021 / 2022

NAMA :

KELAS :

NO ABSEN :



KOMPETENSI DASAR

3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



3.3.1 Memahami Sistem Hukum di Indonesia

TUJUAN PEMBELAJARAN: setelah mengamati teks peserta didik dapat menganalisis makna dan karakteristik sistem hukum di Indonesia.

Petunjuk Pengerjaan:

1. Cermatilah setiap perintah dalam LKPD
2. Untuk mengerjakan pertanyaan berikut ini bukalah laman berikut ini:
<https://moondoggiesmusic.com/pengertian-hukum/#gsc.tab=0>
Bacalah pernyataan dibawah ini dan berilah tanda (V) pada jawaban yang menurutmu benar!!

PERNYATAAN	BENAR	SALAH
1. Salah satu unsur hukum yaitu Peraturan bersifat memaksa		
2. Hukum berdasarkan sumbernya yaitu hukum publik		
3. Hukum berdasarkan waktunya yaitu hukum nasional		
4. Hukum tertulis adalah segala peraturan yg masuk dalam perundang – undangan negara		
5. Doktrin adalah pendapat para ahli		
6. Sanksi diberikan pelanggar hukum		
7. Perjanjian dalam bidang ketatanegaraan antara dua negara atau lebih disebut hukum traktat		
8. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan umum		
9. Ius constitutum merupakan hukum yg berlaku pada masa yang akan datang		
10. Yurisprudensi adalah hukum yang didasarkan pada kebiasaan atau adat		

Tarik Garis sesuai urutan yang benar Lembaga Lembaga Negara dibawah ini sesuai dengan UU NO 12 TAHUN 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. <https://hukum.malangkota.go.id/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>



1

Ketetapan MPR

2

Peraturan Daerah Provinsi

3

UUD NEGARA REPUBLIC INDONESIA TAHUN 1945

4

Peraturan Presiden

5

Peraturan Daerah kabupaten/kota

6

UU/PERPPU